

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus, Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada Universiti Press, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Eko, Sutoro, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan (FPPD), Yogyakarta.

Fahmal, Muin, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hanitijo Soemitro, Roni, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Herlianto, Didit, 2017, *Manajemen Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Huda, Ni'Matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Huda, Ni'Matul. 2014 *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.

Ida, La Ode, 2002, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, dan Clean Governement*, PSPK, Jakarta.

Isharyanto, Prasetya Dila Eka Juli, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa, (Prespektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)* CV. Absolute Media, Yogyakarta.

Koesoemahatmadja, R.D.H, 1979, *Peranan Administrasi Dalam Pembangunan*, Eresco, Bandung.

Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta.

Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, UII Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rozaki, Abdul, 2012, *Mendemokratisasi Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*, IRE, Yogyakarta.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjandra, Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum, Asas Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Situmorang, M, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wahidin, Samsul, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal, Makalah dan Hasil Penelitian

- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2016, *Petunjuk Pengoprasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015, *Petunjuk Pelaksanaan dan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Thantowi, Jawahir, 2004, "Norma Hukum Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 3, April 2004, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Salahudin, 2016, *Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government*, DPPM Universitas Muhammadiyah Malang.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, 2016, *Petunjuk Pengoprasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa*.

Riez Kifli Kolewora, 2018, *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Gunung Kidul terhadap Desa yang Dipandang Tidak Baik dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Tesis, Magister Hukum UGM, Yogyakarta

Sri Wulandari. S, 2017, *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Naomi Simanjuntak, 2018, *Perbandingan Pengawasan Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaen Toba Samosir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi perbandingan di Desa Lumbangaol dan Desa Pardamean Ajibata dengan Desa Lumbanpea Timur dan Desa Pardinggaran)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Internet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kebijakan Dana Desa”, http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-kebijakan-dana-desa-dan-add-2016_kemenkeu.pdf, diakses pada 3 oktober 2017.

<http://www.berdesa.com/daftar-keberhasilan-program-dana-desa-seluruh-indonesia/>, diakses pada hari jumat tanggal 21 september 2018 pukul 00.52 WIB.

<http://bengkelmakalah.blogspot.com/2016/10/makalah-asas-asas-umum-pemerintahan.html>, diakses pada hari jumat 21 september 2018 pukul 05.24 WIB.

<http://asas-asas-pemerintahyangbaik.blogspot.com/2013/06/asas-asas-pemerintahan-yang-baik.html>, diakses pada hari jumat 21 september 2018 pukul 05.27 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2011. Tentang. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Dan Naskah AKADEMIK Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5725).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
- Peraturan Desa Mororejo Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mororejo (RPJMDes) Tahun 2015-2020.
- Peraturan Desa Giripeni Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2014-2020.

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panggunharjo Tahun 2013-2017.

Peraturan Desa Mororejo Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Mororejo Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Mororejo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Desa Giripeni Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Giripeni Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Giripeni Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018

Peraturan Desa Mororejo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Mororejo Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Desa Mororejo Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017

Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018

Peraturan Desa Giripeni Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Giripeni Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017.



Perencanaan Dana Desa Oleh Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pemerintahan Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta)

FAJAR MUHAMMAD N, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Desa Giripeni Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018.